



# RENCANA AKSI TAHUN 2023

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
#melayani  
#bangsa**



<https://pt-jakarta.go.id/>



@pengadilantinggi\_dki\_jakarta



info.ptdkjakarta@mail.com





## **Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2023**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA YANG AGUNG”***

dengan Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2023 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (% dalam Triwulan)			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		• Perdata	95	95	95	95
		• Pidana	95	95	95	95
		• Tipikor	95	95	95	95
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	56	56	56	56
c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	3	3	3	3		

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	DANA
		I	II	III	IV					
1	Melaksanakan persidangan dan minutası perkara masuk untuk perdata, pidana dan tipikor	v	v	v	v	Persidangan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan perkantoran dan layanan umum)	Rp. 46.931.668.000,-
						Pertimbangan Hukum	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan perkantoran dan layanan umum)	Rp. 46.931.668.000,-
						Putusan Hakim	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan perkantoran dan layanan umum)	Rp. 46.931.668.000,-
						Jadwal Sidang / Court Calender	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan perkantoran dan layanan umum)	Rp. 46.931.668.000,-
2	Melaksanakan dan minutası perkara perdata, pidana dan tipikor	v	v	v	v	Pencatatan Register	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan perkantoran dan layanan umum)	Rp. 46.931.668.000,-

		v	v	v	v	Berkas Perkara Bundel B ( Pengetikan PP)	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan perkantoran dan layanan umum)	Rp. 46.931.668.000,-
		v	v	v	v	Salinan Putusan Kegiatan SIPP terlaksana	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan perkantoran dan layanan umum)	Rp. 46.931.668.000,-
		v	v	v	v	Penetapan ( Pembuatan dan Pengiriman)	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan perkantoran dan layanan umum)	Rp. 46.931.668.000,-
		v	v	v	v	Pencatatan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan perkantoran dan layanan umum)	Rp. 46.931.668.000,-
		v	v	v	v	Ceklist kelengkapan berkas	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan perkantoran dan layanan umum)	Rp. 46.931.668.000,-
		v	v	v	v	Pengarsipan putusan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan perkantoran dan layanan umum)	Rp. 46.931.668.000,-
		v	v	v	v	Standar pelayanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan perkantoran dan layanan umum)	Rp. 46.931.668.000,-
		v	v	v	v	Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan perkantoran dan layanan umum)	Rp. 46.931.668.000,-
3	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat	v	v	v	v	Kuisisioner SKM	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan Sarana Internal)	Rp.195.000.000,-
		v	v	v	v	Notulen	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan Sarana Internal)	Rp.195.000.000,-
		v	v	v	v	Laporan/ Tabulasi	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan Sarana Internal)	Rp.195.000.000,-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (% dalam Triwulan)			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu				
		• Perdata	75	75	75	75
		• Pidana	92	92	92	92
		• Tipikor	95	95	95	95

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	DANA
		I	II	III	IV					
1	Melaksanakan Pemantauan pengiriman salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju	v	v	v	v	Surat Pengantar	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Koordinasi, Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 516.130.000,-
		v	v	v	v	Salinan Putusan	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Koordinasi, Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 516.130.000,-
		v	v	v	v	Kegiatan SIPP terlaksana	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Koordinasi, Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 516.130.000,-
		v	v	v	v	Kegiatan Pemantauan	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Koordinasi, Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 516.130.000,-
		v	v	v	v	Kegiatan Pemantauan	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Koordinasi, Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 516.130.000,-

NO	SASARAN STRATEGIS TAMBAHAN	INDIKATOR	TARGET (% dalam Triwulan)			
			I	II	III	IV
1	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan teknis dan administrasi tingkat banding	Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100	100	100	100
2	Peningkatan kualitas SDM	Jumlah tenaga teknis dan administrasi yang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek)	70	70	70	70

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	DANA
		I	II	III	IV					
1	Membuat surat keputusan tentang hakim pengawas daerah	v	v	v	v	SK Hakim Pengawas Daerah	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan perkantoran dan layanan umum)	Rp. 46.931.668.000,-
2	Menyusun matriks dan rencana pengawasan	v	v	v	v	Check list pengawasan dan surat tugas				
3	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	v	v	v	v	Pembinaan dan pengawasan				
4	Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas	v	v	v	v	Laporan Hasil Pengawasan	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Koordinasi, Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 516.130.000,-
5	Melaporkan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	v	v	v	v	Laporan Hasil Pengawasan				
6	Melaksanakan Kegiatan Bimtek	v	v	v	v	Laporan Bimtek				

**RENCANA MONITORING DAN EVALUASI/PENGUKURAN KINERJA INTERNAL SECARA BERKALA  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
TAHUN 2023**

NO	JABATAN	SASARAN/TUSI	INDIKATOR KINERJA	PERJANJIAN KINERJA	TARGET	MONITORING TW 1		MONITORING TW 2		MONITORING TW 3		MONITORING TW 4		PIC	PIHAK TERKAIT
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Ketua Satker	Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan umum serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung RI serta peraturan perundangundangan yang berlaku	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	PK Satker dengan Pimpinan	95%	95%		95%		95%		95%		Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu		95%	95%		95%		95%		95%		Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase perkara pidana tipikor yang diselesaikan tepat waktu		95%	95%		95%		95%		95%		Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		56%	-		56%		-		56%		Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan peradilan		3	-		3		-		3		Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu		92%	92%		92%		92%		92%		Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu		75%	75%		75%		75%		75%		Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

			Persentase salinan putusan Tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu		95%	95%		95%		95%		95%		Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
2	Wakil Ketua	Mewakili Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan umum serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Mahkamah Agung RI, Dirjen Peradilan Umum dan peraturan perundangundangan yang berlaku	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	PK Wakil Ketua dengan Ka. Satker	95%	95%		95%		95%		95%		Wakil Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu		95%	95%		95%		95%		95%		Wakil Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase perkara pidana tipikor yang diselesaikan tepat waktu		95%	95%		95%		95%		95%		Wakil Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		56%	-		56%		-		56%		Wakil Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan peradilan		3	-		3		-		3		Wakil Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu		92%	92%		92%		92%		92%		Wakil Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat		75%	75%		75%		75%		75%		Wakil Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase salinan putusan Tipikor yang dikirim ke		95%	95%		95%		95%		95%		Wakil Ketua Satker	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

			pengadilan pengaju tepat waktu												
3	Panitera	melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.	Persentase dokumen pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana, dan khusus	PK Panitera dengan Ka. Satker	90%	90%		90%		90%		90%		Panitera	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase Dokumen Administrasi, data, dan transparansi perkara yang diselesaikan		90%	90%		90%		90%		90%		Panitera	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase berkas perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum kasasi		90%	90%		90%		90%		90%		Panitera	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase laporan indeks kepuasan pencari keadilan yang diselesaikan		90%	90%		90%		90%		90%		Panitera	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase dokumen salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu		90%	90%		90%		90%		90%		Panitera	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
4	Panitera Muda Pidana	Melaksanakan Administrasi perkara dibidang pidana	Persentase berkas perkara banding yang telah diperiksa dan ditelaah kelengkapannya	PK Panitera Muda Pidana dengan Panitera	90%	90%		90%		90%		90%		Panmud Pidana	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase Berkas perkara banding dan perkara pidana yang telah diperiksa dan ditelaah kelengkapannya		90%	90%		90%		90%		90%		Panmud Pidana	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

			Persentase Berkas Perkara Banding dan Perkara Pidana yang diregistrasi dalam SIPP		90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Pidana	Kepanitera an dan Keseekretari atan
			Persentase dokumen penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan yang diselesaikan		90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Pidana	Kepanitera an dan Keseekretari atan
			Persentase Berkas perkara yang diserahkan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum		90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Pidana	Kepanitera an dan Keseekretari atan
5	Panmud Perdata	melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata	Jumlah Berkas Banding Yang diperiksa dan di telaah kelengkapannya	PK Panitera Muda Perdata dengan Panitera	90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Perdat a	Kepanitera an dan Keseekretari atan
			Jumlah Berkas banding yang Diregistrasi		90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Perdat a	Kepanitera an dan Keseekretari atan
			Jumlah berkas banding yang didistribusikan ke ketua majelis hakim yang telah ditunjuk		90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Perdat a	Kepanitera an dan Keseekretari atan
			Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju		90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Perdat a	Kepanitera an dan Keseekretari atan
			Jumlah perkara putus yang telah diregistrasi		90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Perdat a	Kepanitera an dan Keseekretari atan
			Jumlah BA dan salinan		90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d	Kepanitera an dan

			putusan yang di digialisasi dan diupload ke aplikasi SIPP											Perdat a	Kesekretari atan	
6	Panmud Tipikor	Melaksanakan Administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.	Jumlah Berkas Banding Yang diperiksa dan di telaah kelengkapannya	PK Panitera Muda Pidana Khusus dengan Panitera	90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Tipikor	Kepanitera an dan Kesekretari atan	
			Jumlah Berkas banding yang Diregistrasi			90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Tipikor	Kepanitera an dan Kesekretari atan
			Jumlah berkas banding yang didistribusikan ke ketua majelis hakim yang telah ditunjuk			90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Tipikor	Kepanitera an dan Kesekretari atan
			Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju			90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Tipikor	Kepanitera an dan Kesekretari atan
			Jumlah perkara putus yang telah diregistrasi			90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Tipikor	Kepanitera an dan Kesekretari atan
			Jumlah BA dan salinan putusan yang di digialisasi dan diupload ke aplikasi SIPP			90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Tipikor	Kepanitera an dan Kesekretari atan
7	Panmud Hukum	melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan	Persentase bundel putusan banding dan Bundel B yang diarsipkan	PK Panitera Muda Hukum dengan Panitera	90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Huku m	Kepanitera an dan Kesekretari atan	
			Persentase pengaduan yang Deregister			90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Huku m	Kepanitera an dan Kesekretari atan
			Persentase statistik laporan perkara yang diselesaikan			90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Huku m	Kepanitera an dan Kesekretari atan
			Persentase pelaksanaan penyempahan advokat			90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Huku m	Kepanitera an dan Kesekretari atan

			Persentase laporan IKM yang Dselesaikan		90%	90%		90%		90%		90%		Panmu d Huku m	Kepanitera an dan Keseekretari atan
8	Panitera Pengganti	Menyelesaikan Administrasi Persidangan	Persentase Berita acara sidang yang diselesaikan	PK Panitera Pengganti dengan Panitera	90%	90%		90%		90%		90%		PP	Hakim, Kepanitera an dan Keseekretari atan
			Persentase perkara yang Diminutasi		90%	90%		90%		90%		90%		PP	Hakim, Kepanitera an dan Keseekretari atan
			Persentase berita acara yang diinput ke dalam aplikasi SIPP		90%	90%		90%		90%		90%		PP	Hakim, Kepanitera an dan Keseekretari atan
			Persentase E-Doc putusan yang di unggah ke SIPP		90%	90%		90%		90%		90%		PP	Hakim, Kepanitera an dan Keseekretari atan
9	Analisis Perkara Peradilan Pidana	Menyelesaikan Administrasi Persidangan	Persentase perkara banding pidana yang dicek kelengkapannya	PK Analisis Perkara Peradilan pada Kepaniteraan Pidana dengan Panitera Muda Pidana	90%	90%		90%		90%		90%		Analisis Perkara	PP, Hakim, Kepanitera an dan Keseekretari atan
			Persentase pengiriman surat registrasi berkas pidana banding yang dikirim ke Pengadilan Pengaju		90%	90%		90%		90%		90%		Peradila n Pidana	PP, Hakim, Kepanitera an dan Keseekretari atan
			Persentase penyiapan surat pengantar pengiriman salinan petikan dan putusan Perkara pidana banding		90%	90%		90%		90%		90%		Analisis Perkara	PP, Hakim, Kepanitera an dan Keseekretari atan
			Persentase Perkara banding yang deregister		90%	90%		90%		90%		90%		Peradila n Pidana	PP, Hakim, Kepanitera an dan

															Kesekretariatan
			persentase penerimaan, pembuatan, penyaluran dan penyimpanan perpanjangan penahanan pasal 29 Ayat (1)		90%	90%		90%		90%		90%		Analis Perkara	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			persentase penerimaan, pembuatan, penyaluran dan penyimpanan perpanjangan penahanan Majelis Hakim		90%	90%		90%		90%		90%		Peradilan Pidana	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase pengarsipan surat yang berhubungan dengan tahanan		90%	90%		90%		90%		90%		Analis Perkara Pidana	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
10.	Analis Perkara Peradilan Perdata	Menyelesaikan Administrasi Persidangan	Persentase perkara banding perdata yang diregistrasi	PK Analis Perkara Peradilan pada Kepaniteraan Perdata dengan Panitera Muda Perdata	90%	90%		90%		90%		90%		Analis Perkara Peradilan Perdata	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase amar putusan perkara banding yang dicatat dalam buku register induk perkara		90%	90%		90%		90%		90%		Analis Perkara Peradilan Perdata	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase penyiapan surat pengantar pengiriman salinan putusan dan berkas perkara bundel A yang dikirim ke PN Pengaju		90%	90%		90%		90%		90%		Analis Perkara Peradilan Perdata	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase berkas perkara putus dan diminutasi yang		90%	90%		90%		90%		90%		Analis Perkara Peradilan	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan

			diserahkan ke Panitera Muda Hukum										Perdata	atan
			Persentase amar putusan perkara kasasi dan peninjaukn kembali yang dicatat ke dalam buku register		90%	90%		90%		90%		90%	Analisis Perkara Peradilan Perdata	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase nomor register perkara banding dan pejabat pembuat akta banding yang diinput dalam aplikasi SIPP		90%	90%		90%		90%		90%	Analisis Perkara Peradilan Perdata	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase draft laporan bulanan yang disusun		90%	90%		90%		90%		90%	Analisis Perkara Peradilan Perdata	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
11.	Bendahara Biaya Proses Kepaniteraan Perdata	Menyelesaikan Administrasi Keuangan Kepaniteraan	Persentase pencatatan keuangan masuk dan putus pada buku induk keuangan perkara dan aplikasi SIPP	PK Bendahara Biaya Proses dengan Panitera	90%	90%		90%		90%		90%	Bendahara Biaya Proses Kepaniteraan Perdata	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase penyerahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada bendahara Penerima		90%	90%		90%		90%		90%	Bendahara Biaya Proses Kepaniteraan Perdata	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase laporan keuangan perkara persata yang dilaporkan di aplikasi Komdanas, pelaporan Badilum		90%	90%		90%		90%		90%	Bendahara Biaya Proses Kepaniteraan Perdata	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
12.	Analisis Perkara Peradilan	Menyelesaikan Administrasi	Persentase penyelesaian	PK Analisis Perkara Peradilan pada	90%	90%		90%		90%		90%	Analisis Perkara	PP, Hakim, Kepaniteraan

	Kepaniteraan Hukum	Persidangan dan pelayanan advokat	laporan bulanan dan laporan tahunan	Kepaniteraan Hukum dengan Panitera Muda Hukum										an dan Kesekretariatan	
			Persentase verifikasi Berkas advokat yang akan disumpah		90%	90%		90%		90%		90%		Peradilan	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase kelengkapan data advokat pada aplikasi e court dan buku register advokat		90%	90%		90%		90%		90%		Kepaniteraan	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase pengisian register berkas pidana, perdata, dan tipikor yang sudah diminutasi		90%	90%		90%		90%		90%		Hukum	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase pengarsipan pengaduan dan tindaklanjut		90%	90%		90%		90%		90%		Analisis Perkara	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
13.	Analisis Perkara Peradilan pada Kepaniteraan Tipikor	Menyelesaikan Administrasi Persidangan	persentase penerimaan, pembuatan, penyaluran dan penyimpanan perpanjangan penahanan perkara tipikor	PK Analisis Perkara Peradilan pada Kepaniteraan Tipikor dengan Panitera Muda Tipikor	90%	90%		90%		90%		90%		Analisis Perkara Peradilan pada Kepaniteraan Tipikor	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			pembuatan, penyaluran dan penyimpanan perpanjangan penahanan Majelis Hakim		90%	90%		90%		90%		90%		Analisis Perkara Peradilan pada Kepaniteraan Tipikor	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase perkara banding pidana tipikor yang dicek kelengkapannya		90%	90%		90%		90%		90%		Analisis Perkara Peradilan pada Kepaniteraan Tipikor	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase		90%	90%		90%		90%		90%		Analisis	PP, Hakim,

			pengiriman surat registrasi berkas pidana tipikor banding yang dikirim ke Pengadilan Pengaju										Perkara Peradilan pada Kepaniteraan Tipikor	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase penyiapan surat pengantar pengiriman salinan petikan dan putusan Perkara pidana tipikor banding		90%	90%		90%		90%			Analisis Perkara Peradilan pada Kepaniteraan Tipikor	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase Perkara banding yang deregister		90%	90%		90%		90%			Analisis Perkara Peradilan pada Kepaniteraan Tipikor	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
			Persentase pengarsipan surat yang berhubungan dengan tahanan		90%	90%		90%		90%			Analisis Perkara Peradilan pada Kepaniteraan Tipikor	PP, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Jakarta, 03 Januari 2023

Ketua,



*Soedarmadji*  
**Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum**  
**NIP. 19560405 198203 1 005**



# LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
NOMOR : W10-U/241/KP.01.1/12/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) TAHUN 2022 DAN RENCANA AKSI TAHUN 2023 PADA PENGADILAN  
TINGGI DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Rencana Aksi Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Biokrasi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 DAN RENCANA AKSI TAHUN 2023 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Rencana Aksi tahun 2023 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2022

KETUA,



+ Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.  
NIP. 195604051982031005

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)  
TAHUN 2022 DAN RENCANA AKSI TAHUN 2023  
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

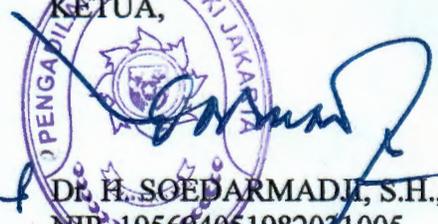
No.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum.
2.	Koordinator Validasi Data	Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.
3.	Ketua I	Sudiyanto, S.H., M.H.
	Ketua II	H. Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H.
4.	Sekretariat I	Itjah Minantika, S.E., S.H., M.H.
	Sekretariat II	Sabrina Napitupulu, S.E, M.H.
5.	Anggota	1. Panitera Muda Perdata 2. Panitera Muda Pidana 3. Panitera Muda Hukum 4. Panitera Muda Khusus Tipikor 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan 7. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI 8. Kepala Sub Bagian Rencana, Program dan Anggaran
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Indah Pratiwie, S.E., M.M. Budiarto, S.H., M.H.



Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.  
NIP. 195604051982031005

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2022 DAN RENCANA AKSI TAHUN 2023 PADA PENGADILAN TINGGI DKI  
JAKARTA

No.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Rencana Aksi 2023 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan revidi atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

KETUA,  
  
DR. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.  
NIP. 195604051982071005



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

**NOMOR : W10.U/44 /KP.01.1/2/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (IKU 2023, LKJiP 2022, PKT 2023, RKT 2023, RKT 2024 DAN RENCANA AKSI 2023) PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,**

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Menimbang** : a. bahwa Dokumen SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah khususnya bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka perlu adanya penyesuaian kegiatan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan hasil penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2022, maka perlu penetapan Dokumen SAKIP Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan.

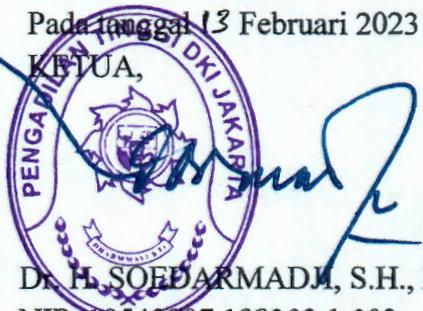
**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (IKU 2023, LKJiP 2022, PKT 2023, RKT 2023, RKT 2024 DAN RENCANA AKSI 2023) PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**
- Kesatu : Menetapkan Dokumen SAKIP (IKU 2023, LKJiP 2022, PKT 2023, RKT 2023, RKT 2024 dan Rencana Aksi 2023), sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Februari 2023

KETUA,

  
Dr. H. SOEDARMADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19540807 198303 1 003